

EDITORIAL

Keragaman adalah realitas Indonesia yang tidak bisa ditolak. Keragaman elemen yang membentuk masyarakat politik (negara) Indonesia terlihat jelas dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semboyan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda namun tetap satu) secara jelas menyatakan bahwa keragaman Indonesia tidak bisa dihomogenisasi. Indonesia adalah satu dalam keragaman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu telah mengantarkan Indonesia sebagai salah satu contoh negara yang mampu memelihara realitas keberagamannya dan mendapatkan manfaat dari keragaman tersebut.

Toleransi antar-kelompok masyarakat yang lahir dari semangat Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan modal sosial yang menjadi kunci keberhasilan Indonesia, dan itu harus terus dipelihara untuk menjaga keutuhan Indonesia yang beragam, baik suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Sayangnya, khususnya di Era Reformasi, toleransi yang adalah kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang beragam itu kerap mengalami pasang surut, dan kemudian menimbulkan konflik antar-kelompok yang beragam di negeri ini.

Dalam perjalanan waktu, toleransi antar-kelompok di Indonesia itu tidak selalu terjaga dengan baik. Ada banyak konflik antar-kelompok masyarakat di negeri ini yang kemudian mengubah wajah Indonesia yang terkenal dengan toleransinya, menjadi negara penuh dengan kekerasan antar-kelompok masyarakat. Ironisnya, pada banyak konflik antar-

kelompok di negeri ini negara seakan tidak hadir. Akibatnya konflik antar-kelompok di negeri ini bukan hanya membawa kerugian harta benda, tetapi juga nyawa manusia.

Salah satu kerusuhan antar-kelompok yang mencoreng wajah Indonesia yang terkenal dengan toleransinya adalah Kerusuhan Mei 1998. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri, yaitu SK Menteri Pertahanan/Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, SK Menteri Luar Negeri, SK Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan SK Jaksa Agung, melaporkan bahwa peristiwa pada tanggal 13-15 Mei 1998 terjadi secara sengaja, terencana, terdapat pola, sistematis, dan diduga merupakan hasil pertarungan politik dari elit untuk memperebutkan kekuasaan.¹

Kerusuhan antar-kelompok di Indonesia yang berlangsung cukup lama, selama hampir setahun, terjadi pada tahun 1998, yaitu konflik antar-kelompok etnis di Sambas dengan kelompok etnis Madura, di Kalimantan Barat. Selama periode konflik tersebut banyak korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak, dan kurang-lebih 68.000 warga setempat mengungsi. Konflik berdarah antar-kelompok ini mengejutkan masyarakat Indonesia. Konflik ini juga mengakibatkan kedua kelompok hidup dalam prasangka dan ketegangan.²

¹ Tim HWRG (ed), *Menguk Tabir Diskriminasi Rasial dan Impunity di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Tifa, 2008), 20-21.

² *Ibid.*, 26-27.

Konflik antar-kelompok yang sama yang terjadi di Sambas, kemudian juga di Kota Sampit, Kalimantan Tengah, yang meledak pada 18 Februari 2001. Konflik di Kalimantan Tengah ini berlangsung selama sepuluh hari. Konflik tersebut menelan korban jiwa dari kedua belah pihak. Sekitar 341 dari kelompok Madura dan 16 orang dari kelompok Dayak, ratusan rumah dibakar dan dirusak.³

Kerusuhan antar-kelompok dalam skala besar juga terjadi di Kota Ambon, Maluku, yang bermula dari konflik antara preman asal Sulawesi Selatan dengan sopir angkutan kota (angkot) Ambon, yang kemudian meluas menjadi konflik antara kelompok masyarakat Ambon dan kelompok masyarakat Bugis, Buton dan Makassar. Karena konflik tersebut kemudian membawa-bawa agama, maka kemudian menjadi konflik antar-kelompok masyarakat Kristen Ambon dengan kelompok masyarakat Islam Ambon. Konflik ini menjadi salah satu konflik terbesar dan terlama di negeri ini, dan dapat dikatakan sebagai bencana nasional yang mengakibatkan hilangnya banyak nyawa, serta harta benda. Konflik yang membawa-bawa nama agama juga terjadi di Maluku Utara yang melibatkan dua kelompok masyarakat yang berbeda agama.⁴

³ Ibid.

⁴ Hikmat Budiman dan Landry H. Subianto, *Komunalisme dan Demokrasi* (Jakarta: Interseksi 2003), 104.

Konflik yang membawa-bawa agama dalam skala besar juga terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Laporan jurnalistik menyebutkan konflik Poso sebagai tragedi tiga babak. Pertama tanggal 25-30 Desember 1998, kedua 15-21 April 2000, dan ketiga tanggal 23 Mei-10 Juni 2001. Ditilik dari sisi dinamika kelompok (*in group-out group*), kerusuhan ini merupakan konflik horizontal antara kelompok Islam dan Kristen. Konflik bermula dari perkelahian antarpemuda (kriminal) berkembang menjadi kerusuhan bernuansa SARA dan tidak terkendali, mengakibatkan tumpuhnya pemerintahan, perekonomian, transportasi dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Agama sesungguhnya bukan merupakan pemicu utama, tapi lebih berperan sebagai faktor pengiring yang datang belakangan, dimanfaatkan sebagai penggalang solidaritas.⁵

Kekerasan antar-kelompok baru-baru ini juga terjadi di Tolikara, Papua. Konflik ini diduga ada kaitannya dengan agama. Pada peristiwa ini bukan hanya bangunan yang menjadi sasaran amuk massa, tapi juga mengakibatkan korban meninggal dan luka parah. Belum selesai persoalan ini, kembali meletus konflik antar-kelompok di Singkil, Aceh. Dugaan sama juga muncul, yakni karena persoalan agama. Lagi-lagi yang menjadi sasaran amuk massa adalah rumah ibadah. Terjadi pembakaran rumah ibadah. Pada peristiwa ini juga ada korban meninggal dan luka-luka.

⁵ Chandra Setiawan, *Direktori Penelitian Agama, Konflik dan Perdamaian* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), 156-157.

Mirisnya, kekerasan antar-kelompok di negeri ini kerap tidak dapat selesai dengan baik. Artinya, kejadian-kejadian kekerasan itu tidak pernah tuntas diselesaikan pemerintah. Akibatnya kejadian yang sama terus berulang. Dan hal ini tentu saja mempengaruhi tingkat toleransi antar-kelompok, khususnya antar-kelompok agama yang berkonflik. Pemerintah Indonesia juga kerap tidak menyadari bahwa konflik yang membawa-bawa nama agama itu bukanlah konflik agama, melainkan konflik yang menggunakan agama untuk kepentingan lain di luar agama.

Orientasi beragama menjadi referensi bagaimana cara seseorang mempraktikkan atau hidup menampakkan kepercayaan dan nilai religiusnya. Orientasi religius ini terbagi dua, yakni orientasi intrinsik dan orientasi ekstrinsik. Orientasi intrinsik sebagai motivasi untuk mencapai tujuan agama itu sendiri. Orang yang termasuk tipe orientasi religius ini, hidupnya menampakkan keyakinan agama untuk kepentingan yang diyakininya. Komitmen terhadap nilai yang diyakini lebih penting dibandingkan ibadah yang tampak. Orang religius bertipe ini secara mendalam terlibat keyakinan dan nilai yang dianut dengan cara mau berkorban bahkan mengalahkan kepentingan dirinya sendiri. Motivasi agama pada orang tersebut menjadi inspirasi langkah-langkah kehidupannya. Orientasi religius intrinsik mengimplikasikan agama sebagai motivasi dan sumber yang memberi pengharapan dalam menjalani kehidupan.

Sementara orang yang tergolong religius ekstrinsik menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai sesuatu hal

yang bukan tujuan agama. Motif orientasi religius ekstrinsik hanya sebatas nilai dan keyakinan sosial atau yang tampak. Tipe ini adalah gambaran orang yang mengejar tujuan untuk kepentingan pribadi dan menggunakan agama untuk mencapai kedudukan sosial dan kekuasaan. Religius ekstrinsik dikatakan sebagai pertanda kurang dewasanya dalam beragama dibandingkan yang intrinsik.⁶

Berdasarkan hal di atas jelaslah, bahwa pemerintah harus berani bersikap tegas dalam menangani konflik antar-kelompok masyarakat, termasuk yang membawa-bawa nama agama, karena sesungguhnya itu bukan konflik agama, melainkan lebih patut disebut tindakan biadab yang memanfaatkan nama agama dari orientasi beragama yang ekstrinsik.

Terkait dengan pentingnya pembahasan mengenai konflik antar-kelompok masyarakat khususnya yang diduga karena faktor agama, jurnal *Societas Dei* pada volume II edisi 2 ini akan menyajikan 5 artikel yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Artikel pertama karya Benyamin Intan, Ph.D. berjudul, "Misi Kristen di Indonesia: Kesaksian Kristen Protestan" menjelaskan mengenai kehadiran, dan pengumpulan gereja-gereja Protestan di Indonesia dalam menjalankan misi Allah di Indonesia. Kemudian artikel Prof. Dr. Christine Schirrmacher

⁶ Sumarno, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian* (Jakarta: PT Buku Seru, 2014), 133.

dari Universitas Bonn, Jerman yang berjudul “The Sharia-based Understanding of Religious Freedom and Women’s Rights in Conflict with the Secular Constitutional State” menjadi pemikiran penting untuk Indonesia yang saat ini masih menghadapi persoalan dengan hadirnya peraturan-peraturan yang bernafaskan agama tertentu. Artikel Dr. (Cand) Binsar A. Hutabarat, M.Th., yang berjudul, “Pendapat Pimpinan-pimpinan Gereja di Bekasi tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006” dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk merespon usulan masyarakat mengenai pencabutan Peraturan Bersama Menteri (PBM) yang kini kembali marak dikumandangkan. Selanjutnya artikel Adrian Jonatan, M.Th., berjudul “Kontribusi Pemikiran Egbert Schuurman mengenai Permasalahan dan Solusi Teknologi Modern” diharapkan menolong agama-agama untuk bersikap kritis terhadap teknologi yang tidak selalu berdampak positif. Artikel Yakub Kartawidjaya, yang berjudul “The Theology of Death in Cantata BWV 106 BY J. S. Bach: A Critical Study,” menjadi artikel terakhir yang secara khusus menyoroti Cantata karya Bach.